

ANALISIS PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA SATUAN PELAKSANA PERHUBUNGAN KECAMATAN CEMPAKA PUTIH (STUDI KASUS PENGELOLAAN PARKIR DI KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR)

Fianda Syaidinar¹, Tri Ubayanto^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : fsyaidinar@gmail.com¹, triubaya33@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

parking, management,
governance

The purpose of this research is to identify the good governance principles at the Transportation Implementation Unit of Cempaka Putih subdistrict, case study of parking management in East Cempaka Putih Village. This research uses qualitative descriptive analysis method to describe and explain in detail the existing phenomena by using interview as supporting instrument. The result of this research shows that the good governance principles at the Transportation Implementation Unit of Cempaka Putih subdistrict have not been well implemented. The obstacle includes the lack of competent human resource. The efforts which can be made include improving competence of the existing human resource, adding personnel, and expanding parking lot.

PENDAHULUAN

Kepemilikan kendaraan bermotor terutama di wilayah Kecamatan Cempaka Putih semakin meningkat dari tahun ke tahun dan juga penggunaan kendaraan pribadi yang kurang efisien. Terbukti bahwa hanya sekitar 4% dari kendaraan pribadi yang dimuati dengan lebih dari 4 orang penumpang yang melintas pada sebagian besar lintasan di pusat kota Jakarta pada jam sibuk. Sementara itu sekitar 82% dari kendaraan pribadi yang dimuati dengan 1-2 orang saja. Dalam hal parkir, lebih dari 60% lahan parkir dipergunakan oleh satu kendaraan lebih dari delapan jam tiap hari (Soemabrata, 2005).

Ketersediaan lahan parkir yang memadai diduga akan menjadi faktor pendorong bagi masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi untuk menggunakannya dalam rangka beraktifitas di bangunan tersebut. Peningkatan penggunaan kendaraan pribadi oleh pengguna bangunan pada akhirnya akan menambah keparahan terjadi kemacetan lalu lintas.

Keadaan yang demikian merupakan dilema yang dihadapi oleh pengelola kota Jakarta dalam mengelola lahan parkir. Ketersediaan fasilitas parkir pada bangunan publik dalam hal ini akan menjadi pendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi. Selanjutnya, dengan adanya peningkatan penggunaan kendaraan pribadi akan berdampak lebih lanjut kepada kepadatan lahan parkir disekitar gedung. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan, pengendalian, pembangunan dan pengkoordinasian lalu lintas angkutan jalan dan penertiban parkir hanya untuk wilayah Jakarta Pusat. Untuk wilayah Kecamatan Cempaka Putih diatur oleh Satuan Pelaksana Perhubungan

Kecamatan Cempaka Putih. Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih bertugas untuk mengatur lalu lintas dan menertibkan parkir liar disepanjang bahu jalan dan trotoar yang tidak ada rambu diprbolehkan parker.

Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan, pengendalian, pembangunan dan pengkoordinasian lalu lintas angkutan jalan dan penertiban parkir hanya untuk wilayah Jakarta Pusat. Untuk wilayah Kecamatan Cempaka Putih diatur oleh Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih. Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih bertugas untuk mengatur lalu lintas dan menertibkan parkir liar disepanjang bahu jalan dan trotoar yang tidak ada rambu diprbolehkan parkir.

Parkir adalah suatu kendaraan yang berhenti dan ditinggalkan oleh pengemudi dalam jangka waktu tertentu. Di Kecamatan Cempaka Putih khususnya di Kelurahan Cempaka Putih Timur ada parkir resmi (legal) dan tidak resmi (illegal). Parkir resmi (legal) yaitu parkir yang disediakan tempat resmi yang aman dan diberikan karcis yang dikenakan biaya distribusi parkir. Parkir tidak resmi (illegal) yaitu parkir berada tempat yang kurang aman seperti di bahu jalan atau di trotoar. Menurut data dilapangan di wilayah Kelurahan Cempaka Putih jumlah parkir legal sejumlah 2 tempat yaitu di pusat perbelajaan, banyak parkir liar (parkir illegal) di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Cempaka Putih Tengah Raya.

Atas dasar pemahaman diatas, penelitian ini akan focus pada Analisis Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih (Pengelolaan Parkir Di Kelurahan Cempaka Putih Timur). Konsentrasi utama penelitian adalah pada Prinsip-Prinsip Good Governance. Menurut United Nation Development Programme (UNDP) yang mana prinsip-prinsip good governance antara lain yakni a) partisipasi, (b) Tegaknya hukum (Rule of Law), (c)Transparansi (Transparency), (d) Peduli pada Stakholder, (e) Konsensus (Consensus), (f) Kesetaraan (Equity), (g) Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency), (h) Akuntabilitas (Accountability),(i) Visi Strategis (Strategic Vision) ini sangat berkaitan dengan tingkat keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan sebuah peraturan . Dimana dengan adanya good governance maka akan tercipta lingkungan yang nyaman dan kondusif. Dimana hal ini juga mengarah pada Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perda No.5 Tahun 2014 tentang ketentuan parkir dan dengan adanya petugas lapangan bertugas untuk mengatur lalu lintas dan tim tindak derek yang bertugas menertibkan parkir liar dengan melakukan penderekan untuk kendaraan roda 4, Operasi Cabut Pentil (OCP) untuk kedaraan roda 2 dan roda 3.

Melihat fenomena seperti ini yang mana belum sesuai dengan tujuan pemerintah yakni menjadi Good Governance maka peneliti tertarik untuk mengambil judul judul “**Analisis Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih (Pengelolaan Parkir Di Kelurahan Cempaka Putih Timur)**”.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Publik** : Menurut Sondang P. Siagian sebagaimana dikutip oleh Pasolong (2014:2) mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses Kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai ujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan Dwight Waldo sebagaimana dikutip dalam Pasolong (2014:3) mendefinisikan administrasi sebagai suatu daya upaya yang kooperatif dengan tingkat rasionalitas yang tinggi. Berdasarkan kedua definisi tersebut, maka administrasi dapat

- digambarkan sebagai suatu kegiatan kerjasama yang dilaksanakan dengan kooperatif dan berdasarkan kesadaran yang sama guna mewujudkan tujuan yang telah disepakati bersama.
2. **Administrasi Publik** : Menurut Chandler dan Plano (2008:3) mengemukakan bahwa : “administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan- keputusan dalam kebijakan publik.”
 3. **Kebijakan Publik** : menurut Muhlis Madani (2011), bahwa “Kebijakan adalah sebuah fenomena kompleks. Fenomena tersebut terdiri dari sejumlah keputusan yang dibuat oleh sejumlah atau beberapa individu. Selain itu, dibuat juga oleh organisasi pemerintahan yang ada.”
 4. **Governance** : diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalahmasalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.
 5. **Pengelolaan** : Menurut (Syamsi, 2008) pengelolaan adalah “Proses, cara, perbuatan pengelolaan yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau yang memberikan pengawasan suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan dengan menggunakan tenaga orang lain.”
 6. **Parkir** : adalah lalu lintas berhenti yang ditinggal pengemudi saat mencapai suatu tempat tujuan dengan jangka waktu tertentu. Perilaku pengendara kendaraan bermotor memiliki kecenderungan untuk memarkir kendaraannya tidak jauh dengan tempat kegiatannya.

Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual pada penelitian ini adalah bahwa ketersediaan fasilitas parkir di Wilayah Kecamatan Cempaka Putih masih sedikit. Masih banyak parkir liar di daerah tersebut yang dikarenakan keterbatasan lahan parkir di bangunan publik dan jumlah pengguna kendaraan pribadi yang cukup banyak. Seberapa jauh pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh adanya ketersediaan lahan parkir pada bangunan publik terhadap penggunaan kendaraan pribadi.

Seperti yang kita ketahui bahwa parker liar adalah problem yang sangat kompleks yang ada di ibukota. Dimana dengan jumlah penduduk yang banyak dan penggunaan kendaraan bermotor yang sangat tinggi maka masalah parker liar menjadi masalah yang hendaknya mendapatkan penanganan yang intens juga dari pemerintah. Parkir liar menimbulkan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki, dimana trotoar yang harusnya akses pejalan kaki digunakan untuk parkir kendaraan. Maka dari itu parkir liar ini penting untuk segera diselesaikan.

Mengingat pengentasan masalah parkir liar ini adalah bagian terwujudnya Good Governace maka untuk mensosialisasikan masalah yang terjadi diatas, dalam penelitian ini menggunakan Prinsip-prinsip Good Governance menurut UNDP (United Nation Development Programme), 1997 dan menurut Pemerintahan Indonesia, yaitu (a) partisipasi, (b) Tegaknya hukum (Rule of Law), (c)Transparansi (Transparency), (d) Peduli pada Stakholder, (e) Konsensus (Consensus), (f) Kesetaraan (Equity), (g) Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency), (h) Akuntabilitas (Accountability), (i) Visi Strategis (Strategic Vision).

Penelitian ini membahas tentang Analisis Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih (Pengelolaan Parkir di Kelurahan Cempaka Putih Timur). Penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk mengetahui bagaimana pengelolaan parkir yang ada di Kelurahan Cempaka Putih Timur.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara seksama untuk mencapai suatu tujuan melalui suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Terkait dengan keterangan di atas, pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham naturalistik (fenomenologis) menurut Mohammad Mulyadi (2011:6).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan menganalisa Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih (Pengelolaan Parkir Di Kelurahan Cempaka Putih Timur). Penelitian mengenai Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih (Pengelolaan Parkir Di Kelurahan Cempaka Putih Timur) dimana landasan teori 9 aspek yaitu :

1. Partisipasi
2. Tegaknya hukum (Rule of Law)
3. Transparansi (Transparency)
4. Peduli pada Stakholder,
5. Konsensus (Consensus)
6. Kesetaraan (Equity)
7. Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)
8. Akuntabilitas (Accountability)

Visi Strategis (Strategic Vision) menurut Sedarmayani (2009) Jika Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Satuan. Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih (Pengelolaan Parkir Di Kelurahan Cempaka Putih Timur) ini dioptimalkan maka diharapkan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih (Pengelolaan Parkir Di Kelurahan Cempaka Putih Timur) lebih baik lagi. Untuk menguji penelitian ini, berdasarkan teori dari dari Sedarmayani (2009) didalami melalui indeks interview terhadap key informan/informan kunci yang terkait dengan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih (Pengelolaan Parkir Di Kelurahan Cempaka Putih Timur). Pengujian teori Penerapan Program diatas yaitu dengan menggunakan teknik purposive sampling (sampai bertujuan).

Mengingat jenis dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, maka data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi dan studi lapangan serta data dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa kategori dengan beberapa indikator yang dianggap sesuai dengan permasalahan penelitian dan kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun dari 9 (Sembilan) unsur tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan yang lainnya saling berkaitan guna menganalisis Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih (Pengelolaan Parkir Di Kelurahan Cempaka Putih Timur).

Berikut penulis sajikan dalam bentuk analisis verbatim atas entitas Prinsip- Prinsip Good Governance Pada Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih (Pengelolaan Parkir Di Kelurahan Cempaka Putih Timur), dengan indikator yang di lakukan oleh aparatur / pegawai Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih (Pengelolaan Parkir Di Kelurahan Cempaka Putih Timur). Berikut penulis sajikan dalam bentuk analisis verbatim atas entitas Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih (Pengelolaan Parkir Di Kelurahan Cempaka Putih Timur), terdapat beberapa indikator yaitu:

1. Partisipasi
2. Tegaknya hukum (Rule of Law)
3. Transparansi (Transparency)
4. Peduli pada Stakholder,
5. Konsensus (Consensus)
6. Kesetaraan (Equity)
7. Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)
8. Akuntabilitas (Accountability)
9. Visi Strategis (Strategic Vision)

Pembahasan

1. Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih (Pengelolaan Parkir Di Kelurahan Cempaka Putih Timur)

Dalam menciptakan good governance maka perlu memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dibawah ini:

1) Partisipasi

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.

2) Tegaknya hukum (Rule of Law)

Dalam melakukan tegaknya hukum Dinas Perhubungan menugaskan tim tindak dan tim derek untuk melakukan penertiban terhadap pengendara yang melanggar peraturan. Dasar hukum yang digunakan Dinas Perhubungan yaitu, Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi dan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UULLAJ). Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita good governance, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: Supremasi hukum (the supremacy of law), Kepastian hukum (legal certainty), Hukum yang responsip, Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, Independensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3) Transparansi (Transparency)

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

4) Peduli pada Stakholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks praktek lapangan dunia usaha, pihak korporasi mempunyai tanggungjawab moral untuk mendukung bagaimana good governance dapat berjalan dengan baik di masing-masing lembaganya. Pelaksanaan good governance secara benar dan konsisten bagi dunia usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki oleh setiap lembaga korporasi yang ada didunia. Dalam lingkup tertentu etika bisnis berperan sebagai elemen mendasar dari konsep CSR (Corporate Social Responsibility) yang dimiliki oleh perusahaan. Pihak perusahaan mempunyai kewajiban sebagai bagian masyarakat yang lebih luas untuk memberikan kontribusinya. Praktek good governance menjadi kemudian guidance atau panduan untuk operasional perusahaan, baik yang dilakukan dalam kegiatan internal maupun eksternal perusahaan. Internal berkaitan dengan operasional perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut bekerja, sedangkan eksternal lebih kepada bagaimana perusahaan tersebut bekerja dengan stakeholder lainnya, termasuk didalamnya public.

5) Konsensus (Consensus)

Menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsesus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa (coercive power) bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili.

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur- prosedur. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif agar pengemudi tidak melakukan parkir disembarang tempat lagi.

6) Kesetaraan (Equity)

Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi.

7) Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)

Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil- guna. Kriteria efektif biasanya di ukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintahan itu efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan- perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan disusun secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan yang rasional tersebut, maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah, karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8) Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang- undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas. Melakukan pembenahan sistem transportasi Pembenahan sistem transportasi tidak bisa dilakukan secara parsial, harus ada keterpaduan multidimensi dan komitmen lintas sektor dalam melakukan pembenahan sistem transportasi.

9) Visi Strategis (Strategic Vision)

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan

apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

2. Hambatan-Hambatan dalam Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih (Pengelolaan Parkir Di Kelurahan Cempaka Putih Timur)

Dalam Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih (Pengelolaan Parkir Di Kelurahan Cempaka Putih Timur) ada beberapa hambatan-hambatan yang sering terjadi antara lain:

- 1) Personil kami yang masih kurang untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat
- 2) SDM yang ada belum berkompeten pada bidangnya.
- 3) Waktu sosialisasi dari aparat tersebut kadang tidak sesuai
- 4) Belum tersedianya lahan parkir yang memadai. Dan sistem e-parking belum berjalan optimal

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Hambatan-Hambatan dalam Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih (Pengelolaan Parkir Di Kelurahan Cempaka Putih Timur)

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan diatas antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan pegawai
- 2) Memperbanyak pelatihan SDM dan memotivasi pegawai
- 3) Memberikan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi, sehingga menumbuhkan rasa ingin belajar setiap pegawai
- 4) Memberikan edukasi tentang tujuan yang ingin dicapai
- 5) Memperbanyak pengembangan karir pegawai dapat memberikan kepuasan kerja dan menciptakan pegawai yang handal.
- 6) Harus adanya komunikasi dua arah antar instansi dan masyarakat.
- 7) Penyiapan lahan parkir yang luas dan adanya pembatasan waktu parkir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti tentang Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih (Pengelolaan Parkir Di Kelurahan Cempaka Putih Timur), dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

1. Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih (Pengelolaan Parkir Di Kelurahan Cempaka Putih Timur), belum berjalan dengan baik.
2. Hambatan-hambatan yang masih terjadi adalah sumber daya manusia masih kurang dan belum berkompeten pada bidangnya.
3. Adapun upaya yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kompetensi dari sumber daya manusia yang ada dan menambah jumlah personil yang ada serta adanya perluasan lahan parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah dan Djam'an Satori, 2010, Metodologi Penelitian. Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- Agustino, L. (2008). Dasar - dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara, Bandung : Pustaka setia
- Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipata.
- Abdulahak, Ishak dan Ugi Suprayogi. 2011. Penelitian Tindakan dalam Pendidikan. Nonformal. Jakarta: Rajawali Pers .
- Creswell, J., W., 2012, Research design Pendekatan kualitatif, Kuantitatif dan. Mixed; Cetakan ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. Pengantar Ilmu Administrasi, PT Prestasi.Pustakaraya. Jakarta.
- Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy. Analisis.Gava Media: Yogyakarta.
- Hardiansyah, 2011, Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya, Cetakan Ke-1, Gava Media, Yogyakarta.
- Hellriegel dan Slocum. 2011. Organizational Behavior 13.th edition. South- Western Cengage.
- Indonesia, C. (2020, July 23). Pengertian administrasi <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-administrasi-menurut-para-ahli/>
- Irawan, Prasetya , 2010 , Manajemen Sumber Daya Manusia, STIA-LAN Press, Jakarta.
- Jakarta, P. (2019) Penegertian, Metode, Faktor-Faktor Analisis SWOT
- Judge Timothy A, Robbins Stephen P. 2014, Robbins & Judge. 2013. Organizational Behavior, Fifteenth Edition. Pearson.
- Kusumaningtyas, R. H. (2016). Evaluasi dan perancangan system informasi lahan parkir. Studia Informatika:Jurnal Sistem Informasi, 9(1).
- Keban, Yeremias T., 2008, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Isu., Gavamedia, Yogyakarta.
- Kotler, Philip, 2016. Marketing Management, 15th Edition, Pearson Education, Inc.
- Kotler, Philip and Kevin Lane Keller, 2016.: Marketing Management, 15th Edition New Jersey: Pearson Prentice Hall, Inc.
- Kolter, Philip 2014. Principle Of Marketing. 15 th Editions New Jersey : Pearson Prentice Hall.
- Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki. 2014. Organizational behavioral-Ed. 5. Jakarta Salemba Empat.
- Laksana, Wijaya, Muhibudin., Mukarom, Zaenal., 2015, Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance, Pengantar Abdullah, Budi., Cetakan Ke-1, Pustaka Setia, Bandung.
- Lupiyoadi Rambat, 2013. Manajemen Pemasaran jasa Edisi kedua.

- Penerbit Salemba Empat: Jakarta Media, G. (2020) Kebijakan Publik
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-publik/>
- Media, T. (2021) Pengertian Good Governace
<https://kamus.tokopedia.com/g/good-governance/>
- Mukarom, Zaenal dan Muhibudin Wijaya Laksana. 2015. Manajemen Pelayanan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Pasolong, Harbani., 2010. Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung.
 _2017. Teori Administrasi Publik, Cetakan Kedelapan, Alfabeta, Bandung.
- Setyosari, Punaji. 2010. Metode Penelitian Penelitian dan Pengembangan. Jakarta: Kencana.
- S.F. Marbun dan Moh.Mahfud MD, 2016. Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara,. Liberty, Yogyakarta
- Saputra, P. D., & Najid, N. (2018). Pengendalian Penggunaan Kendaraan Pribadi Dengan Strategi Parkir Dan Erp Di Sudirman–Thamrin (Dki Jakarta. JMITS: Jurnal Mitra Teknik Sipil, 1(2), 9-18.
- Sondang P. Siagian. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Bumi. Aksara.
- Subarsono. (2011). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka
- Subiakto, V. U. (2019). Strategi Sosialisasi Kebijakan Penderekan oleh Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat. CoverAge: Journal of Strategic Communication, 9(2), 31-42.
- Sukmadinata, N.S. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosadakarya
- Sulfiani, A. N. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo. CoverAge: Jurnal Administrasi Publik, . 17(1), 102-116
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
 _2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
 _ Sugiyono .2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syafri, Wirman. 2012. Studi tentang Administrasi Publik. Jatinangor : Erlangga
- Pasolong, H. (2008). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
<https://www.kumpulanpengertian.com/2018/03/pengertian-analisis- swot-menurut-para.html>
- Putra, A. S. (2020). Analisa Dan Perancangan Sistem Tata Kelola Parkir Cerdas Di Kota Pintar Jakarta. IKRA-ITH INFORMATIKA: Jurnal Komputer dan Informatika, 4(3), 13-21.
- PURWANTI, A. (2020, November 1). Pengertian Administrasi Publik
<https://www.indonesiastudents.com/pengertian-administrasi-publik/>
- Tjiptono, Fandy., 2012, Pemasaran Jasa, Prinsip, Penerapan dan Penelitian, Andi Yogyakarta.
 _ 2014, Pemasaran Jasa, Prinsip, Penerapan dan Penelitian, Andi Yogyakarta.

_2017, Pemasaran Jasa, Prinsip, Penerapan dan Penelitian, Andi Yogyakarta.

Wahyuni, Yuyun. 2011. Metode Penelitian . Yogyakarta: Fitramaya.

Yusnita, R., Norbaya, F., & Basharuddin, N. (2012). Intelligent parking space detection system based on image processing. *International Journal of Innovation, Management and Technology*, 3(3), 232-235

Zeitmhal, Valarie A, Pasuraman, Leonard L Berry, 1990, Delivering Quallity Service, New York, Oxford Sydney, The Free Press

Jurnal- Jurnal

International Journal of Innovation, Management and Technology, Vol. 3, No. 3, June 2012. Intelligent Parking Space Detection System Based on Image Processing. R. Yusnita, Fariza Norbaya, and Norazwinawati Basharuddin

Jurnal Adminitrasi Publik Vol. XVII (1) 2021: 95-116. Penerapan Prinsip- Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo. Andi Ni'mah Sulfiani

Jurnal Sistem Informasi, 9(1), 2016, 15-27. Evaluasi dan Perancangan Sistem Informasi Lahan Parkir. Rinda Hesti Kusumaningtyas

Journal of Strategic Communication Vol. 9, No. 2, Hal. 31-42. Maret 2019. Strategi Sosialisasi Kebijakan Penderekan oleh Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat. Vania Utamie Subakti

Jurnal Administrasi Publik Volume XVII (1) 2021: 95-116 P-ISSN: 1858- 2168, E-ISSN: 2621-251X doi : 10.52316/jap.v17i1.59. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. Andi Ni'mah Sulfiani

Vol 1 No 2 (2019): *Musamus Journal Of Public Administration* . Good Governance Dalam Pemerintahan. Paul Adryani Moento